

**ANALISIS PENGARUH PDRB UPAH DAN
INFLASI TERHADAP
PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1991 - 2009**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**YENY DHARMAYANTI
NIM. C2B308004**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yeny Dharmayanti
Nomor Induk Mahasiswa : C2B308004
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan)

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PDRB, UPAH DAN
INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1991 - 2009**

Dosen Pembimbing : Hastarini Dwi Atmanti, SE., MSi

Semarang, September 2011

Dosen Pembimbing

(Hastarini Dwi Atmanti, SE., MSi)

NIP. 197508212002122001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Yeny Dharmayanti

Nomor Induk Mahasiswa : C2B308004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan)

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PDRB, UPAH DAN
INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1991 - 2009**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 September 2011

Tim Penguji :

1. Hastarini Dwi Atmanti, SE., M.Si ()
2. Dra. Hj. Herniwati RH., MS ()
3. Nenek Woyanti, SE, M.Si ()

Mengetahui

Pembantun Dekan

Anis Chariri, SE, Mcom. Ph. D. Akt

196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yeny Dharmayanti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS FAKTOR PENENTU PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1991 - 2009 adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, September 2011

Yang membuat pernyataan,

(Yeny Dharmayanti)

NIM. C2B308004

ABSTRACT

Economic development was essentially a series of policy efforts aimed at improving living standards for people to expand employment opportunities and direct distribution of income equally. In Indonesia the economic development of employment opportunities remains a major problem. This arises because of gaps or imbalances in it. Highlights of this issue stems from the gap between the number of labor force growth on the one hand and the progress of various sectors of the economy to absorb labor on the other hand. The purpose of this study was to analyze the value of GDP, Wages and Inflation partially against Unemployment rate in Central Java province in 1991 to 2009. And analyze the value of GDP, Wages and Inflation in common - equal to the level of open unemployment in the province of Central Java in 1991 to 2009.

Analysis of the data in this study using Multiple Linear Regression Method. Hypothesis testing using the partial test (t test), simultaneous (F test) and Test Coefficient of Determination (R²). The data used in this study was the data of GDP, Wages, Inflation and Unemployment in Central Java province in 1991 – 2009.

The results showed the influence of GDP on unemployment t values obtained at -2.164 with a significance of 0.047 <0.05, thus obtained t count (-2.164) <-1.753. This means that GDP has a significant negative effect on unemployment. Thus Hypothesis 1 was received. Test results obtained by the influence of wages on unemployment t value of 7.851 with a significance of 0.000 <0.05. = 5%. T value table for $\alpha = 5\%$ in one direction was obtained by +1.753. Thus got t count (7.851) > 1.753. This means that wages have a significant positive effect on unemployment. Thus Hypothesis 2 is received. The results of testing the influence of inflation on unemployment t values obtained at 2.358 with a significance of 0.032 <0.05. = 5%. T value table for α one direction was obtained +1.753. Thus got t count (2.358) > 1.753. This means that inflation has a significant positive effect on unemployment. Thus, Hypothesis 3 received. The test results simultaneously obtained F value of 54.580 with a significance of 0.000 <0.05. Obtained value of F calculated (54.581) > F table (3.287). This means that unemployment can be affected by GDP, Wages and Inflation together.

Key words: Unemployment, GDP, Wages, Inflation

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau ketimpangan dalam mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dipihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai PDRB, Upah dan Inflasi secara individu terhadap tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991 – 2009. Dan menganalisis nilai PDRB, Upah dan Inflasi secara bersama – sama terhadap tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 – 2009.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. Uji hipotesis menggunakan pengujian secara parsial (uji t), simultan (uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R^2). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB, Upah, Inflasi dan Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991 – 2009

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh PDRB terhadap pengangguran diperoleh nilai t sebesar -2,164 dengan signifikansi sebesar $0,047 < 0,05$, dengan demikian diperoleh t hitung $(-2,164) < -1,753$. Hal ini berarti bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran. Dengan demikian Hipotesis 1 diterima. Hasil pengujian pengaruh Upah terhadap pengangguran diperoleh nilai t sebesar 7,851 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai t tabel untuk $\alpha = 5\%$ uji satu arah diperoleh sebesar $\pm 1,753$. Dengan demikian diperoleh t hitung $(7,851) > 1,753$. Hal ini berarti bahwa Upah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran. Dengan demikian Hipotesis 2 diterima. Hasil pengujian pengaruh Inflasi terhadap pengangguran diperoleh nilai t sebesar 2,358 dengan signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$. Nilai t tabel untuk $\alpha = 5\%$ uji satu arah diperoleh sebesar $\pm 1,753$. Dengan demikian diperoleh t hitung $(2,358) > 1,753$. Hal ini berarti bahwa inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran. Dengan demikian Hipotesis 3 diterima. Hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai F sebesar 54,580 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Diperoleh nilai F hitung $(54,581) > F$ tabel $(3,287)$. Hal ini berarti Pengangguran dapat dipengaruhi oleh PDRB, Upah dan Inflasi secara bersama-sama.

Kata kunci : Pengangguran, PDRB, Upah, Inflasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS FAKTOR PENENTU PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1990 - 2009** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, bantuan, kerja sama, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Melalui lembar halaman ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Ibu Hastarini Dwi Atmanti, SE., MSi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan segala kemudahan, nasehat dan saran yang tulus, dan pengarahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE, MSi selaku dosen wali yang dengan tulus memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis menjalani studi di Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya jurusan IESP yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta para karyawan Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis.

5. Petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Semarang yang telah memberikan bantuan berupa data dan referensi yang bermanfaat.
6. Bapak dan mama tersayang Eko Sudaryono SH. dan Yulaeni SE atas segala doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tiada batasnya sampai kapanpun.
7. Adik – adikku Fienda Dwi Paramita SH dan Fithriyah Nur Hamidah atas bantuan, dukungan dan semangat yang diberikan kepadaku selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan di IESP Reg II : Ayu, Arjanggal, Whisnu, Pungki, Ilham, Zulham, Dita, Diana, Margin, Bety, Nisa, Hasya, Sukma, Fredy, mba Ulfa, mba Betty, Ariska, Ami, Andika,
9. Teman-teman IESP Reg II angkatan 2006, 2007, 2008
10. Teman – teman sebimbangan : Riza, Azzi, Nita, Lita
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik dimasa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, September 2011

Yeny Dharmayanti

NIM. C2B308004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1.3.1 Tujuan Penelitian	20
1.3.2 Kegunaan penelitian	20
1.4 Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Landasan teori	23
2.1.1 Pengangguran	23
2.1.2 PDRB	26
2.1.3 Upah	28
2.1.4 Inflasi	37
2.2 Hubungan Variabel Dependen terhadap Variabel Independen	47
2.2.1 Hubungan PDRB terhadap Pengangguran	47

2.2.2	Hubungan Upah terhadap Pengangguran	49
2.2.3	Hubungan Inflasi terhadap Pengangguran	50
2.3	Penelitian Terdahulu	51
2.4	Kerangka Pemikiran	57
2.5	Hipotesis.....	61
BAB III	METODE PENELITIAN.....	62
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	62
3.2	Jenis dan Sumber Data	64
3.3	Metode Pengumpulan Data	65
3.4	Metode Analisis	65
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	72
4.1	Deskriptif Objek Penelitian	72
4.1.1	Pengangguran	72
4.1.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	75
4.1.3	Upah	77
4.1.4	Inflasi.....	78
4.2	Hasil Analisis	79
4.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	79
4.2.2	Pengujian Statistik Analisis Regresi	83
4.2.2.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .	83
4.2.2.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	85
4.2.2.3	Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	86
4.3	Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	86
4.3.1	Pengaruh PDRB terhadap Pengangguran	86
4.3.2	Pengaruh Upah terhadap Pengangguran	87
4.3.3	Pengaruh Inflasi terhadap pengangguran	88
BAB V	PENUTUP	89
5.1	Kesimpulan	89
5.2	Keterbatasan	90
5.3	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Angka Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1991 - 2009...	5
Tabel 1.2 Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 - 2009	8
Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 – 2009 (Atas Dasar Harga Konstan 2000)	10
Tabel 1.4 Upah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 - 2009	13
Tabel 1.5 Inflasi Provinsi Jawa Tengah 1991 - 2009	16
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	55
Tabel 4.1 Uji Multikolinieritas dengan Auxiliary Regression	81
Tabel 4.2 Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ...	81
Tabel 4.3 Hasil Uji Glejser	82
Tabel 4.4 Nilai T-Statistik Pengaruh PDRB, Upah dan Inflasi terhadap Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1991 - 2009	83
Tabel 4.5 Nilai F-Statistik Pengaruh PDRB, Upah dan Inflasi terhadap Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1991 – 2009	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kurva Philips	51
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran.....	60
Gambar 4.1 Pertumbuhan Pengangguran.....	73
Gambar 4.2 Pertumbuhan PDRB	76
Gambar 4.3 Pertumbuhan Upah	77
Gambar 4.4 Pertumbuhan Inflasi.....	78
Gambar 4.5 Uji Normalitas	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Data Mentah	94
Lampiran B. Hasil Output Analisis Regresi	95
Lampiran C. Hasil Output Uji Normalitas.....	96
Lampiran D. Hasil Output Uji Autokorelasi	97
Lampiran E. Hasil Output Uji Gletjser	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau ketimpangan dalam mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dipihak lain.

Pembangunan ekonomi yang bertujuan antara lain pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mengentaskan kemiskinan, menjaga kestabilan harga dengan selalu memperhatikan tingkat inflasi, menjaga keseimbangan pembayaran, perhatian yang cukup terhadap neraca perdagangan, pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata, dan mengatasi masalah pengangguran. Untuk mencapai tujuan tersebut oleh negara diluncurkan berbagai kebijaksanaan misalnya kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan nonmoneter, dan lain-lain.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang dalam pengelompokkan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat, dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk

Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2007)

Gejala pengangguran yang terselubung di daerah pedesaan dan pinggiran kota merupakan sebagian akibat dari kurang tersedianya lapangan kerja yang produktif penuh (yang membawa hasil kerja dan nafkah mata pencaharian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar). Indonesia masih dihadapkan pada dilema kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan internal terjadi dengan indikator bahwa tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh (Boediono, 1993).

Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran serta menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penduduk untuk meningkatkan kemakmuran suatu masyarakat. Kemakmuran tersebut dapat dilihat dari indikator pengukur prestasi kegiatan ekonomi yaitu : 1) Pendapatan Nasional, 2) Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, 3) Tingkat inflasi, dan 4) Neraca perdagangan dan neraca pembayaran (Sukirno, 2001).

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih tingginya angka pengangguran jika di bandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Oleh karena itu, pengangguran menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya penanganan permasalahan pengangguran.

Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahun membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah.

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. BPS mendefinisikan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas, sedang bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Penduduk usia kerja tersebut terbagi dalam angkatan kerja yang mencakup bekerja dan mencari kerja serta bukan angkatan kerja terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga. (BPS, 2010).

Berikut ini disajikan data tentang angka pengangguran di Indonesia dari tahun 1991 – 2009 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Angka Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1991 - 2009

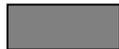
No	Propinsi	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	NAD	31.219	32.286	27.485	57.688	123.302	108.240	91.539	108.385	125.122	128.327	135.926	149.652	284.034	156.960	220.241	189.169	171.424	171.412	165.361
2	Sumatera Utara	99.459	116.352	122.148	136.475	331.606	303.663	256.390	353.468	387.686	421.639	487.932	562.209	564.410	610.540	636.980	632.049	571.334	554.539	532.427
3	Sumatera Barat	38.143	48.084	49.014	42.860	134.439	86.414	86.985	100.079	113.948	143.893	163.085	182.148	198.856	258.224	225.860	243.525	217.305	171.134	173.080
4	Riau	32.112	38.055	47.595	49.419	134.578	101.988	103.874	103.176	130.736	151.954	183.962	215.157	251.701	364.594	355.568	202.387	207.138	183.522	193.505
5	Kepulauan Riau																71.914	53.077	53.333	55.313
6	Jambi	16.323	19.050	16.708	16.007	60.797	40.670	42.220	28.792	39.724	45.953	54.073	67.092	74.376	73.108	103.149	78.264	76.090	66.371	73.904
7	Sumatera Selatan	76.270	66.639	88.152	70.810	202.223	129.676	134.420	81.473	174.559	185.063	235.964	278.586	272.797	282.225	287.188	310.851	314.814	280.657	263.471
8	Kep. Bangka Belitung												22.142	32.440	33.960	39.340	42.210	32.956	31.421	33.126
9	Bengkulu	7.981	12.036	10.644	13.645	29.747	23.620	24.288	14.916	25.765	31.463	48.921	51.636	54.245	48.312	49.509	48.993	37.681	39.719	42.141
10	Lampung	25.153	25.660	33.263	39.754	172.336	128.798	101.802	138.459	145.931	164.961	214.790	275.253	298.310	249.690	229.131	307.689	269.132	255.217	239.980
11	DKI Jakarta	230.685	190.938	193.117	174.008	441.443	363.300	446.720	499.500	668.322	592.479	569.741	549.356	589.682	602.741	615.917	490.761	552.380	580.511	569.337
12	Jawa Barat	433.609	548.015	534.931	561.564	1.738.974	1.125.848	1.072.515	1.302.133	1.764.384	1.846.290	1.987.645	2.191.531	1.979.065	2.319.715	2.527.807	2.561.525	2.386.214	2.263.584	2.079.830
13	Banten												530.060	517.068	549.593	549.995	754.617	632.762	656.560	652.462
14	Jawa Tengah	311.193	309.139	296.920	288.606	333.504	459.483	568.465	817.903	664.921	637.900	688.190	1.081.694	1.163.188	1.299.220	1.346.404	1.197.244	1.356.909	1.360.219	1.252.267
15	DI Yogyakarta	33.194	31.131	37.186	34.148	76.388	60.760	62.328	56.088	59.236	75.962	81.974	90.436	98.559	113.560	93.507	117.948	115.200	107.529	121.046
16	Jawa Timur	334.845	336.623	354.237	390.646	787.793	592.893	569.238	720.234	883.478	945.321	989.653	1.168.461	1.571.420	1.447.263	1.629.882	1.575.299	1.366.503	1.296.313	1.033.512
17	Bali	24.875	23.070	21.371	21.137	88.269	44.629	44.310	52.098	43.699	58.194	78.372	84.047	100.226	89.640	81.748	120.188	77.577	69.548	66.470
18	NTB	13.559	7.878	13.863	12.120	126.062	43.658	30.681	52.992	25.092	71.845	98.630	139.354	123.814	149.156	174.996	186.259	135.264	124.300	131.258
19	NTT	10.838	12.749	19.227	19.157	43.545	38.320	41.525	46.803	50.907	64.972	75.941	84.181	79.891	91.722	117.821	74.744	77.725	80.814	89.395
20	Kalimantan Barat	20.333	13.892	18.227	5.397	88.869	58.746	62.618	62.251	34.927	86.341	127.639	176.485	118.898	153.464	171.724	182.198	138.796	116.782	119.684
21	Kalimantan Tengah	9.770	5.882	8.109	16.489	46.711	24.268	34.300	35.381	30.044	42.961	51.926	57.625	63.001	48.168	45.262	67.631	52.015	47.247	48.435
22	Kalimantan Selatan	17.821	23.501	29.376	30.467	80.639	49.625	44.358	62.850	37.464	73.946	96.283	147.193	121.530	99.975	99.547	144.765	131.935	110.081	115.812
23	Kalimantan Timur	23.793	26.682	37.110	34.132	85.869	79.706	71.874	98.990	128.265	130.754	133.096	135.193	44.645	120.715	111.180	177.997	149.796	157.376	158.224
24	Sulawesi Utara	34.604	36.272	49.047	54.508	134.228	110.137	96.710	64.203	97.572	99.385	101.753	102.182	49.974	107.008	143.752	141.866	127.996	108.754	110.957
25	Gorontalo												43.392	34.483	45.360	37.993	30.039	27.973	24.258	26.351
26	Sulawesi Tengah	17.146	21.844	16.808	18.318	74.103	45.762	35.717	48.789	44.524	62.964	78.520	86.505	43.003	60.692	78.145	119.058	99.219	65.282	66.009
27	Sulawesi Selatan	62.152	67.367	94.338	100.223	310.388	167.079	138.157	170.042	213.185	285.083	38.520	432.035	586.768	603.220	516.622	400.688	372.714	311.768	314.664
28	Sulawesi Barat																27.820	25.634	22.650	23.064
29	Sulawesi Tenggara	7.624	10.246	11.256	12.604	44.446	25.130	19.306	19.126	32.058	43.851	58.623	72.006	86.722	85.455	79.081	89.441	61.162	56.138	47.319

Lanjutan Tabel 1.1 Angka Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1991 - 2009

No	Propinsi	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
30	Maluku	15.203	20.167	24.044	22.109	60.277	47.299	48.700	34.040	45.305	47.396	44.961	39.108	62.073	58.986	58.631	71.854	67.421	59.684	63.015
31	Maluku Utara												48.909	28.123	28.623	34.496	28.837	23.983	27.323	28.564
32	Papua												68.476	67.788	99.432	92.778	52.735	49.674	47.191	46.008
33	Papua Barat																	28.029	26.189	26.626
34	Irian Jaya Barat																	31.073	28.642	27.952
TOTAL		1.951.684	2.032.369	2.185.602	2.245.536	6.251.201	4.407.769	4.275.155	5.062.483	6.030.319	5.813.231	8.005.031	9.132.104	9.531.090	10.251.351	10.845.254	10.932.000	10.011.142	9.394.515	8.962.617

Sumber : BPS, 2011

Keterangan :



: Belum ditetapkan sebagai propinsi (sebelum pemekaran)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa angka pengangguran yang tertinggi adalah di provinsi Jawa Barat, sedangkan propinsi Jawa Tengah berada pada urutan kedua. Masalah pengangguran tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, akan tetapi juga terjadi pada lingkup regional, seperti pada Provinsi Jawa Tengah. Pengangguran yang tiap tahun meningkat di Provinsi Jawa Tengah menjadi masalah serius yang harus diatasi baik itu oleh pemerintah atau pihak yang terkait.

Menurut Deni Tisna (2008 dalam Wijayanto, 2010) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada 2009 mencapai 1,25 juta orang atau 7,9 persen dari total orang yang bekerja mencapai 15.46 juta orang. Jumlah angkatan kerja di Jateng sebanyak 16,69 juta orang, 15.46 juta orang bekerja sisanya 1,25 juta orang pengangguran terbuka. Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi pengangguran, namun masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Laju peningkatan kesempatan kerja tidak sebanding dengan laju peningkatan pencari kerja (Warta Nusantara, 2009).

Pertumbuhan angkatan kerja di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan tidak dapat terserap seluruhnya di dunia kerja sehingga menimbulkan adanya pengangguran terbuka yang jumlahnya mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 1991 sampai tahun 2009, berdasarkan data yang diperoleh terdapat penurunan angka pengangguran terbuka pada tahun 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, 2006, dan 2009, sedangkan peningkatan angka pengangguran terbuka terjadi pada tahun 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, dan 2008. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 – 2009 (Jiwa)

Tahun	Angkatan Kerja		Jumlah	Pertumbuhan (%)
	Bekerja	Pengangguran Terbuka		
1991	13.424.784	311.193	13.735.977	
1992	13.544.104	309.139	13.853.243	0,85
1993	13.611.177	296.920	13.908.097	0,40
1994	13.632.439	288.606	13.921.045	0,09
1995	13.462.285	333.504	13.795.789	-0,90
1996	14.262.731	459.483	14.722.214	6,72
1997	14.128.038	568.465	14.696.503	-0,17
1998	14.186.853	817.903	15.004.756	2,10
1999	14.621.149	664.921	15.286.070	1,87
2000	14.491.222	637.900	15.129.122	-1,03
2001	15.066.542	688.190	15.754.732	4,14
2002	15.154.856	1.081.694	16.236.550	3,06
2003	151.24.082	1.163.188	16.287.270	0,31
2004	15.528.110	1.299.220	16.827.330	3,32
2005	15.548.609	1.346.404	16.895.013	0,40
2006	15.210.931	1.197.244	16.408.175	-2,88
2007	15.567.335	1.356.909	16.924.244	3,15
2008	16.304.058	1.360.219	17.664.277	4,37
2009	15.835.382	1.252.267	17.087.649	-3,26

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2011

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Sasana, 2001 dalam Sukmaraga, 2011). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Tabel 1.3 menggambarkan peningkatan PDRB Jawa Tengah pada tahun 1991-2009.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 – 2009
(Atas Dasar Harga Konstan 2000)

TAHUN	PDRB	Pertumbuhan (%)
1991	86.507.094,72	
1992	90.943.359,13	5,13
1993	99.609.850,28	9,53
1994	117.476.964,20	17,94
1995	119.222.000,90	1,49
1996	122.478.881,50	2,73
1997	125.166.672,30	2,19
1998	119.468.846,20	-4,55
1999	116.326.423,10	-2,63
2000	114.701.304,80	-1,40
2001	116.816.400,30	1,84
2002	118.038.541,10	1,05
2003	122.166.462,50	3,50
2004	126.789.872,30	3,78
2005	130.051.213,90	2,57
2006	144.682.654,74	11,25
2007	152.110.253,80	5,13
2008	171.790.369,90	12,94
2009	177.685.267,60	3,43

Sumber : BPS Jateng, 2011

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1991 sampai tahun 2009 dengan melihat indikator persentase pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1994 terjadi peningkatan PDRB yang paling tinggi yakni sebesar 17,94% dengan menggunakan dasar harga konstan 2000 dan pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 1998 yakni sebesar 4,55% dengan menggunakan dasar harga konstan 2000.

Namun dalam kenyataannya pertumbuhan PDRB yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru ternyata masih sangat terbatas dalam menyerap tambahan tenaga kerja sehingga pengangguran cenderung meningkat sebagaimana terlihat pada tabel 1.2. Perhatian Pemerintah terhadap nasib pekerja sebenarnya bukan cerita baru, banyak kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk perbaikan nasib pekerja, antara lain K3, Jamsostek dan upah minimum. Namun pada kenyataannya pelaksanaan peraturan-peraturan ini banyak mengalami hambatan baik karena ketidakmampuan maupun kurangpedulian pengusaha, hal ini tercermin dari banyaknya kasus pemogokan buruh yang menuntut haknya. Nampaknya sampai saat ini pemerintah Indonesia masih meyakini bahwa upah minimum merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki nasib pekerja yang berpenghasilan rendah. Hal yang juga diyakini oleh *International Labor Organization* (ILO) yang mengemukakan bahwa “*minimum wages have an important role to play in protecting low income groups*” (ILO, 1991 dalam Iskandarsyah 1996). Disamping itu dengan pemberian upah minimum yang layak diharapkan pekerja dapat memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, namun bila ditinjau dari teori ekonomi klasik dan neoklasik bahwa penetapan upah minimum bukan dianggap kebijakan yang tepat. Menurut teori ini pasar tenaga kerja sama saja dengan pasar lainnya yang membutuhkan keseimbangan permintaan dan penawaran. Bila upah minimum berada di atas upah riil maka akan terdapat surplus tenaga kerja. Dengan kata lain, dalam teori ini penetapan upah minimum pada dasarnya adalah investasi terhadap mekanisme pasar, dan setiap investasi terhadap mekanisme pasar akan menyebabkan ketidakefisienan. Seperti yang dikemukakan oleh *World Bank* bahwa pada kenyataannya upah minimum hanya akan meningkatkan biaya tenaga

kerja di sektor formal yang menyebabkan permintaan tenaga kerja di sektor tersebut menurun dan kemudian menyebabkan meningkatnya penawaran tenaga kerja di sektor informal dan di sektor pedesaan, yang pada akhirnya menyebabkan penghasilan pekerja yang berpenghasilan rendah menjadi semakin rendah (*World Bank*, 1990 dalam Iskandarsyah, 1996)

Namun apabila kita mengacu pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga melihat dari konteks permasalahan negara berkembang, Indonesia tidak mungkin menyerahkan penetapan upah pekerja atau buruh kepada mekanisme pasar sebab di dalam pasar tenaga kerja kita masih terlihat ketidakseimbangan struktural. Menurut Simanjuntak (2001) setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran.

Istilah *urban formal sector* adalah pasar tenaga kerja yang dimimpikan oleh hampir semua orang, dimana mereka bisa bekerja di pemerintahan atau perusahaan berskala besar dengan fasilitas kerja yang modern, bergengsi, dan

memperoleh upah yang tinggi. Pemberian upah yang tinggi disebabkan karena umumnya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan meskipun tidak mempekerjakan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi pemerintah menekan mereka dengan menerapkan upah minimum. Dengan tingkat upah yang lebih tinggi ini maka akan selalu terdapat antrian panjang para pencari kerja (Iskandarsyah, 1996).

Pada tabel 1.4 berikut ini disajikan tentang gambaran kenaikan upah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1991- 2009 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Upah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1991 – 2009

TAHUN	UPAH (Rp)
1991	40.000
1992	40.000
1993	50.000
1994	50.000
1995	90.000
1996	102.000
1997	113.000
1998	130.000
1999	153.000
2000	185.000
2001	247.030
2002	326.581
2003	366.919
2004	394.414
2005	422.586
2006	491.553
2007	550.000
2008	601.419
2009	679.083

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2011

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa rata – rata tingkat upah pekerja untuk Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1991-2009 setiap tahunnya terlihat mengalami perkembangan. Peningkatan rata – rata tingkat upah di sebabkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di awali pada tahun 1991 sebesar 40.000 rupiah dan pada tahun selanjutnya tingkat upah terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya tingkat upah berdampak pada penyerapan tenaga kerja atau perluasan tenaga kerja dimasa yang akan datang. Penentuan tingkat upah harus sesuai dengan ”hukum” ekonomi pasar tenaga kerja, yaitu bahwa tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan hal itu juga sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur sistem pengupahan dan upah minimum.(BPS Indikator Tingkat Hidup Pekerja, 2009).

Inflasi (*inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian ada negara yang

menghadapai tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (*hyper inflation*) (Amir, 2009).

Didasarkan pada faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu: 1) inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) dan 2) inflasi desakan biaya (*cost-push inflation*) 3) inflasi karena pengaruh impor (*imported inflation*). Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) atau inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (*full employment and full capacity*). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus (Amir, 2009).

Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan *output* dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka pengangguran tinggi, ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi semakin mengecil atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil. Dari sini terlihat bahwa pemerintah harus menjalankan

kebijakan makro yang tepat. Inflasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Apabila tingkat inflasi meningkat, maka harga-harga barang dan jasa akhir juga akan naik, selanjutnya permintaan akan barang dan jasa akhir akan turun, dan akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan, akibatnya akan meningkatkan jumlah pengangguran terbuka. Sehingga inflasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran (Sukirno, 1994). Tabel 1.5 menggambarkan inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 1991-2009.

Tabel 1.5
Inflasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1991 – 2009

Tahun	Inflasi
1991	9,62
1992	11,55
1993	9,37
1994	7,00
1995	8,45
1996	4,37
1997	10,88
1998	70,28
1999	1,33
2000	8,57
2001	13,81
2002	11,52
2003	4,45
2004	5,75
2005	15,97
2006	6,50
2007	6,24
2008	9,55
2009	3,32

Sumber : BPS Jateng, 2011

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada

di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana angka pengangguran dapat ditekan serendah mungkin (Wijayanto, 2010).

Tisna (2008, dalam Wijayanto, 2010) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah dalam periode 1991– 2009 dengan mengambil permasalahan pengangguran dan menggunakan variabel PDRB, inflasi dan upah.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Moch. Rum Alim (2007) tentang analisis faktor penentu pengangguran terbuka di Indonesia periode tahun 1980 – 2006 mendapatkan hasil bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode tahun 1980-2006. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amri Amir (2007) tentang Pengaruh Inflasi

dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, penelitian ini menggunakan data tahun 1980 – 2005. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh nyata antara tingkat inflasi terhadap pengangguran dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran di Indonesia pada periode tahun penelitian.

Usaha penelitian sudah banyak dilakukan secara mendalam dan mencakupi secara luas berbagai bidang kegiatan ekonomi dengan penelaahan serangkaian variabel dalam kaitannya dengan permasalahan pengangguran sehingga diperlukan suatu studi lebih lanjut dengan pengembangan – pengembangan model dan penyertaan variabel lain yang sesuai agar hasilnya lebih baik lagi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan mengambil judul “Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Prvinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1991– 2009”.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan utama pembangunan ekonomi diantaranya adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu indikator pengukur prestasi kegiatan ekonomi untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu masyarakat (Sukirno, 2001). Angka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan nomor dua di Indonesia. Hal ini akan menjadi beban bagi perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah angka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah yang tinggi.

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis pengaruh nilai PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh PDRB, Upah dan Inflasi secara bersama-sama terhadap tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi pihak yang membutuhkan terutama bagi penelitian sejenis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan kependudukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang membahas tentang permasalahan penelitian, rumusan masalah yang membahas

tentang konsep yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui suatu penelitian, tujuan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian dan kegunaan penelitian bagi khasanah ilmu pengetahuan, serta sistematika penulisan mencakup uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada setiap bab yang ada pada skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori yang menjabarkan teori-teori guna mendukung rumusan hipotesis, penelitian terdahulu sebagai bahan referensi pembandingan bagi penelitian ini, kerangka pemikiran untuk memperjelas maksud penelitian dan menunjukkan hubungan variabel penelitian, hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap variabel-variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian variabel deskripsi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional variabel berdasarkan pada satu atau lebih sumber. Jenis dan sumber data berisi tentang deskripsi jenis data dari variabel penelitian. Metode pengumpulan data menjelaskan metode pengambilan data penelitian yang digunakan. Metode analisis berisi tentang deskripsi jenis atau teknik analisis dan mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian yang membahas secara umum objek penelitian. Analisis data yang

menitikberatkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik yang digunakan. Interpretasi hasil analisis dari objek penelitian sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Keterbatasan penelitian menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil. Saran merupakan anjuran bagi pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, menurut Sukirno (2002) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Marius (2004) menyatakan bahwa pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

2. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*)

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.

3. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah

menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

Marius (2004) menyatakan bahwa Bila ditinjau dari sebab-sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu:

1. Pengangguran Friksional (Transisional).

Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain. Contoh: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur.

3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural

Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Contoh: Di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan.

4. Pengangguran Musiman (Seasonal)

Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern.

6. Pengangguran Politis

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran.

7. Pengangguran Deflatoir

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

2.1.2 PDRB

Arsyad (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja.

Tolok ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Mengambil analisis makro Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku. PDRB menurut harga konstan adalah merupakan ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik, sebab perhitungan output barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Nainggolan, 2009).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2005), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

2.1.3 Upah

Upah merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karena jumlah upah atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya perusahaan. Upah yang dimaksud disini adalah balas jasa yang berupa uang atau balas jasa lain yang diberikan lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerjanya. Pemberian upah atau balas jasa ini dimaksud untuk menjaga keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga semangat kerja karyawan dan tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat.

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS, 2008). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 8/1981 tentang Perlindungan Upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang

yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Bab I Pasal 1 angka 30 dijelaskan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam Bab X Bagian Kedua tentang Pengupahan Pasal 88 diatur sebagai berikut :

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;

- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proposional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan di dalam Pasal 89 ayat (1) upah minimum terdiri atas :

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan yang telah dan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu

persetujuan, undang-undang dan peraturan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Dari beberapa rumusan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasarnya upah adalah merupakan balas jasa yang telah diserahkan oleh pemberi kerja/majikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Yang paling utama dari upah adalah merupakan perjanjian, yang mana pihak pekerja menerima untuk sepakat atas besarnya upah yang satu sisi telah ditetapkan, baik oleh Pemerintah dalam bentuk upah minimal dan dilain sisi ditetapkan oleh pengusaha atau pemberi kerja sehingga dapat dikatakan bahwa upah merupakan perjanjian sepihak, dimana pekerja sebagai pihak yang lemah dan tidak mempunyai nilai tawar.

Kartasapoetra (1992) menyatakan bahwa jenis-jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

2. Upah Nyata

Upah nyata ini ialah upah uang yang nyata yang benar benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari :

- a. besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;
- b. besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang in natura tersebut.

3. Upah Hidup

Hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi. Kemungkinan setelah masyarakat Adil dan Makmur yang sedang kita perjuangkan dapat terwujud sebaik baiknya, upah yang diterima buruh pada umumnya dapat berupa upah hidup, ataupun pula kalau perusahaan tempat kerjanya itu dapat berkembang dengan baik, sehingga menjadi perusahaan yang kuat yang akan mampu memberi upah hidup, karena itu maka pihak buruh baiklah

berjuang, berpahit-pahit dahulu dengan pihak pengusaha agar perusahaan yang kuat itu dapat terwujud.

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan. Bertitik tolak dari hubungan formal ini haruslah tidak dilupakan bahwa seorang buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnya kalau buruh itu mendapatkan penghargaan yang wajar dan atau perlindungan yang layak.

Menurut Kartasapoetra (1992), tujuan utama penentuan upah minimum yaitu:

- a. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja.
- b. Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material kurang memuaskan.
- c. Mendorong kemungkinan diberikannya dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja.
- d. Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan.
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.

4. Upah Wajar

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif ditandai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai dengan Perjanjian Kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara Upah Minimum dan Upah Hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan buruh dengan keluarganya (di samping mencukupi kebutuhan pokok juga beberapa kebutuhan pangan lainnya, transportasi dan sebagainya).

Faktor-faktor yang mempengaruhi upah wajar (*fair wages*) adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi ekonomi negara secara umumnya.
- b. Nilai upah rata-rata di daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi.
- c. Posisi perusahaan dilihat dari struktur ekonomi negara.
- d. Undang-undang terutama yang mengatur masalah upah dan jam kerja.
- e. Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam lingkungan perusahaan.
- f. Peraturan perpajakan.

- g. Pengusaha dan Organisasi Buruh yang mengutamakan gerak saling harga menghargai dan musyawarah serta mufakat dalam mengatasi segala kesulitan.
- h. Standar hidup dari para buruh itu sendiri.

Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan Upah Hidup, mengingat Upah Hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan kita umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya.

Kartasapoetra (1992) menyatakan bahwa pihak-pihak yang berwenang dalam masalah penetapan upah adalah:

- a. Pihak pengusaha atau badan usaha/perusahaan yang mempekerjakan para buruhnya, dalam hal ini bagi pihak pengusaha atau badan usaha/perusahaan upah itu merupakan unsur pokok dalam perhitungan ongkos produksi dan merupakan komponen harga pokok yang sangat menentukan kehidupan perusahaan. Di Indonesia upah sebagai unsur harga pokok mencapai 30%. Bagi investor, upah merupakan indikator bagi maju atau mundurnya perusahaan dan ikut merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan penanaman modal, yang dalam hal ini tingginya upah dalam suatu perusahaan sedang perusahaan itu dalam kenyataannya berkembang dengan baik, akan merupakan daya tarik.
- b. Pihak buruh yang dapat dikatakan selalu mengharap upah, upah merupakan penghasilan dan pendorong bagi kegairahan dan

atau kegiatan bekerja, upah menggambarkan besar kecilnya sumbangan para buruh terhadap pengusaha atau perusahaannya, upah itu merupakan lambang buruh

Adapun pihak pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam masalah masalah pengupahan atau perupahan, yaitu:

- a. Organisasi Perburuhan,
- b. Pemerintah.

Bagi Organisasi Buruh, upah mencerminkan berhasil atau tidaknya pencapaian salah satu tujuan dan merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan adanya organisasi tersebut. Menurut Asyhadie (2007 dalam Setiadi, 2009) sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Ada beberapa macam sistem pembayaran upah :

1. Sistem Upah Jangka Waktu

Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.

2. Sistem Upah Potongan

Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya.

3. Sistem Upah Permufakatan

Sistem upah permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.

4. Sistem Skala Upah Berubah

Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik jumlah upahnya pun naik. Sebaliknya jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.

5. Sistem Upah Indeks.

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata dari upah.

6. Sistem Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.

2.1.4 Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang di jumpai di hampir semua negara di dunia adalah Inflasi. Boediono (1999) menyatakan bahwa definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari

harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga karena musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau "penyakit" ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulangnya. Sedangkan Sukirno (2002) menyatakan bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian.

Boediono (1999) menyatakan bahwa ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi, dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada tujuan kita. Penggolongan pertama didasarkan atas "parah" tidaknya inflasi tersebut. Di sini kita bedakan beberapa macam inflasi:

1. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
2. Inflasi sedang (antara 10 -- 30% setahun)
3. Inflasi berat (antara 30 - 100% setahun)
4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun).

Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dan tergantung pada "selera" kita untuk menamakannya. Dan lagi sebetulnya kita tidak bisa menentukan parah tidaknya suatu inflasi hanya dari

sudutdaju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang Menanggung beban atau yang memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Kalau seandainya laju inflasi adalah 20% dan semuanya berasal dari kenaikan dari barang-barang yang dibeli oleh golongan yang berpenghasilan rendah, maka seharusnya kita namakannya inflasi yang parah.

Penggolongan yang kedua adalah atas dasar sebab musabab awal dari inflasi. Atas dasar ini kita bedakan dua macam inflasi:

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demand inflation*.
2. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebut *cost inflation*.

Jika permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah, akibatnya tingkat harga umum naik. Bila ongkos produksi naik misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak, maka akibat dari kedua macam inflasi tersebut, dari segi kenaikan harga output, tidak berbeda, tetapi dari segi volume output (GDP riil) ada perbedaan. Dalam kasus *demand inflation*, biasanya ada kecenderungan untuk output (GDP riil) naik

bersama-sama dengan kenaikan harga umum. Besar kecilnya kenaikan output ini tergantung kepada elastisitas kurva *aggregate supply*; biasanya semakin mendekati output maksimum semakin tidak elastis kurva ini. Sebaliknya, dalam kasus *cost inflation*, biasanya kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang (kelesuan usaha).

Perbedaan yang lain dari kedua proses inflasi ini terletak pada urutan dari kenaikan harga. Dalam *demand inflation* kenaikan harga barang akhir (*output*) mendahului kenaikan barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah dan sebagainya). Sebaliknya, dalam *cost inflation* kita melihat kenaikan harga barang-barang akhir (*output*) mengikuti kenaikan harga barang-barang *input*/faktor produksi. Kedua macam inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktek dalam bentuk yang murni. Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia adalah kombinasi dari kedua macam inflasi tersebut, dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

Penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi. Di sini kita bedakan:

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*).
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di negara-negara

langganan berdagang negara kita. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan : 1) secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor, 2) secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi dan kemudian, harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus di impor (*cost inflation*), 3) secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan (tetapi ini tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (*demand inflation*).

Boediono (2002) menyatakan bahwa "Penularan" inflasi dari luar negeri ke dalam negeri bisa pula lewat kenaikan harga barang-barang ekspor, dan saluran-salurannya hanya sedikit berbeda dengan penularan lewat kenaikan harga barang-barang impor. (1) Bila harga barang-barang ekspor (seperti kopi, teh) naik, maka indeks biaya hidup akan naik pula sebab barang-barang ini langsung masuk dalam daftar barang-barang yang tercakup dalam indeks harga. (2) Bila harga barang-barang ekspor (seperti kayu, karet timah dan sebagainya) naik, maka ongkos produksi dari barang-barang yang menggunakan barang-barang tersebut dalam produksinya (perumahan, sepatu, kaleng dan sebagainya) akan naik, dan kemudian harga jualnya akan naik pula (*cost inflation*). (3) Kenaikan harga barang-barang ekspor berarti kenaikan penghasilan eksportir (dan

juga para produsen barang-barang ekspor tersebut). Kenaikan penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang (baik dari dalam maupun luar negeri). Bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, maka harga-harga barang lain akan naik pula (demand inflation). Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini jelas lebih mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu yang sektor perdagangan luar negerinya penting (seperti Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya). Namun berapa jauh penularan tersebut terjadi juga tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah yang diambil. Dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter dan perpajakan tertentu pemerintah bisa menetralsir kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut.

Sukirno (2008) menyatakan bahwa berdasarkan jenisnya inflasi dapat dibedakan menjadi :

a. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran ini akan menimbulkan inflasi.

b. Inflasi desakan biaya

Inflasi ini juga berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila

perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

Boediono (1999) menyatakan bahwa dalam prakteknya untuk mengetahui penyebab timbulnya inflasi (terutama inflasi yang kronis atau yang telah berjalan lama) dan merumuskan dan kemudian melaksanakan kebijaksanaan untuk menanggulangnya, adalah masalah yang sulit dan pelik. Biasanya kita harus melampahi batas-batas ilmu ekonomi dan memasuki bidang ilmu sosiologi dan ilmu politik. Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masaiiah sosio-ekonomi-politis. Secara garis besar ada 3 kelompok teori mengenai penyebab terjadinya inflasi, yaitu:

1. Teori Kuantitas

Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari (a) jumlah uang yang beredar, dan (b) psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectations*). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (apakah berupa penambahan uang kartal atau penambahan uang giral tidak menjadi soal). Tanpa ada kenaikan jumlah uang

yang beredar, kejadian seperti, misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat "bahan bakar" bagi api inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab awal dari kenaikan harga tersebut.

- b. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Ada 3 kemungkinan keadaan, yaitu : 1) bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya (yaitu, memperbesar pos Kas dalam buku neraca para anggota masyarakat). Ini berarti bahwa sebagian besar dari kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang, 2) bila masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Orang-orang mulai mengharapkan kenaikan harga. Penambahan jumlah uang yang beredar tidak lagi diterima oleh masyarakat untuk menambah pos kasnya, tetapi akan digunakan untuk membeli barang-barang (memperbesar pos aktiva barang-barang di dalam neraca), 3) keadaan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah

yaitu tahap hiperinflasi. Dalam keadaan ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keengganan untuk memegang uang kas dan keinginan membelanjakannya untuk membeli barang sebegitu uang kas tersebut diterima di tangan menjadi semakin meluas di kalangan masyarakat.

2. Teori Keynes

Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bias disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan *inflationary gap*). *Inflationary gap* ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang.

3. Teori Strukturalis

Teori Strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*inflexibilities*) dari struktur

perekonomian negara-negara sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi "jangka panjang". Dengan lain perkataan, yang dicari di sini adalah: faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi yang berlangsung lama? Menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi.

- a. Ketegaran yang pertama berupa "ketidakelastisan" dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena: (a) Harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan dibanding dengan harga barang-barang impor yang harus dibayar, atau sering disebut dengan istilah dasar penukaran (*terms of trade*) yang makin memburuk. (b) Supply atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga (supply barang-barang ekspor yang tidak elastis). Kelambanan pertumbuhan ekspor ini berarti kelambanan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi maupun untuk investasi). Akibatnya, negara tersebut (yang berusaha, sesuai

dengan rencana pembangunannya untuk mencapai target pertumbuhan tertentu terpaksa mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang yang sebelumnya diimpor (*import substitution strategy*), meskipun seringkali produksi dalam negeri ini mempunyai ongkos produksi yang lebih tinggi (dan sering pula dengan kualitas yang lebih rendah) daripada barang-barang yang sejenis yang diimpor.

- b. Ketegaran yang kedua berkaitan dengan "ketidakelastisan" dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan penghasilan perkapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk naik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan (di sektor industri) untuk memperoleh kenaikan upah/gaji. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi, yang berarti pula kenaikan harga dari barang-barang tersebut.

2.2 Hubungan Variabel Dependent terhadap Variabel Independent

2.2.1 Hubungan PDRB terhadap Pengangguran

Menurut Todaro pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih

tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan PDRB yang dihasilkan suatu daerah, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah PDRB. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Penelitian lain yang menyatakan pengaruh negatif antara PDRB terhadap jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran.

2.2.2 Hubungan Upah terhadap Pengangguran

Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang pekerja akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

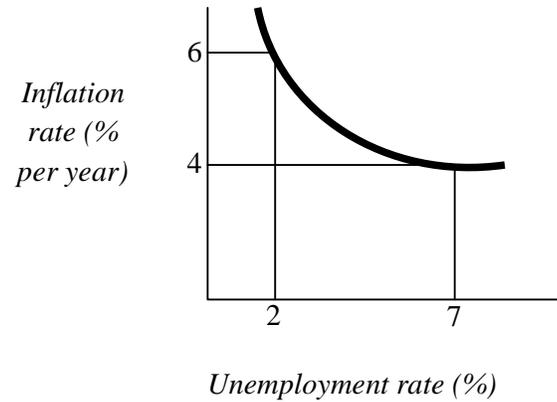
Menurut Samuelson (1997 dalam Alghofari 2010) menyatakan bahwa peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli.

2.2.3 Hubungan Inflasi terhadap Pengangguran

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2002).

Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada *trade off*) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah.

Gambar 2.1
Kurva Phillips



Sumber : Alghofari, 2010

Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan dengan permasalahan sama dengan penelitian ini antara lain adalah :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Amri Amir (2007) berjudul "Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia". Tujuan dari penelitian ini adalah ingin meneliti seberapa besar pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. Penelitian ini juga mengacu pada analisis kurva phillips serta menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara tingkat pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka pengangguran akan menurun sekitar 0,46%. Dengan demikian, penggambaran kurva phillips yang menghubungkan inflasi dengan tingkat pengangguran untuk kasus Indonesia tidak tepat untuk digunakan sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran. Hasil analisis statistik pengujian pengaruh inflasi terhadap pengangguran selama periode 1980 – 2005 ditemukan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan tingkat pengangguran.
- b. Penelitian Farid Alghofari (2010) tentang Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007 bertujuan untuk menganalisis hubungan jumlah penduduk, tingkat inflasi, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 1980-2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan data dan grafik yang tersaji dan

analisis korelasi untuk mengetahui besarnya tingkat hubungan antar variabel. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk dan angkatan kerja, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi hubungannya positif dan lemah, hal ini mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan terhadap jumlah pengangguran.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Rum Alim (2007) dengan judul Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1980-2007 dengan tujuan untuk menentukan pengaruh dari laju pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. Teknik statistik yang digunakan adalah regresi Linier Berganda (analisis regresi berganda) Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode sejak tahun 1980 sampai 2007.
- d. Indra Oloan Nainggolan (2007) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada

Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data panel. Dengan variable bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota, Tingkat Bunga Kredit, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi (UMK) sedangkan variabel terikat adalah kesempatan kerja. Metode analisis yang dipergunakan adalah Metode Generalized Least Square (GLS) dengan Random Efek Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota berpengaruh positif sebesar 76,38% dan signifikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif sebesar 53,06% dan signifikan, dan Tingkat Bunga Kredit berpengaruh negatif sebesar 7,29% dan tidak signifikan terhadap kesempatan bekerja pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2009) tentang analisis pengaruh PDB sektor industri, upah riil, suku bunga riil, dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan sedang dan besar di Indonesia tahun 1990-2008. Metode analisis data yang digunakan adalah adalah model *Ordinary Least Square*. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji T menunjukkan bahwa PDB sektor industri berpengaruh signifikan dan positif, upah riil berpengaruh signifikan dan positif, suku bunga riil berpengaruh tidak signifikan dan

jumlah unit bisnis berpengaruh tidak signifikan juga. Dari variabel tersebut, variabel upah riil adalah variabel yang paling mempengaruhi dari semua. Pada uji F, PDB sektor industri, upah riil, tingkat bunga riil dan jumlah unit usaha menunjukkan pengaruh yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur besar dan menengah di Indonesia.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Masalah dan Variabel	Alat Analisis	Kesimpulan
Amri Amir (2007)	Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia	Seberapa besar pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. Variabel penelitian yang digunakan adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran	Regresi linear berganda	Tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi dan pengangguran dan Ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi
Farid Alghofari (2010)	Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007	Bagaimana hubungan antara jumlah penduduk, tingkat inflasi, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 1980-2007. Variabel penelitian yang digunakan adalah tingkat inflasi, besaran upah, pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran	Korelasi <i>Karl Person's</i>	Jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran

Moch. Rum Alim (2007)	Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1980-2007	Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. Variabel penelitian yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, tingkat inflasi dan pengangguran terbuka	Regresi linier Berganda	Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode sejak tahun 1980 sampai 2007.
Indra Oloan Nainggolan (2007)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara	Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Variabel penelitian yang digunakan adalah	Regresi linier Berganda	PDRB Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan, UMK berpengaruh negatif dan signifikan, dan Tingkat Bunga Kredit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan bekerja pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara

Wicaksono (2009)	Analisis pengaruh PDB sektor industri, upah riil, suku bunga riil, dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan sedang dan besar di Indonesia tahun 1990-2008.	Bagaimana pengaruh PDB sektor industri, upah riil, suku bunga riil, dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan sedang dan besar di Indonesia tahun 1990-2008. Variabel penelitian yang digunakan adalah PDB sektor industri, upah riil, tingkat bunga riil, jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur	Regresi linier Berganda	PDB sektor industri, upah riil, tingkat bunga riil dan jumlah unit usaha menunjukkan pengaruh yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur besar dan menengah di Indonesia
---------------------	---	---	----------------------------	---

2.4 Kerangka Pemikiran

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia mengakibatkan lonjakan angkatan kerja. Akan tetapi dengan sempitnya lahan pekerjaan di Indonesia ini, para angkatan kerja tersebut tidak akan terserap sepenuhnya, bahkan tidak terserap dalam jumlah banyak. Akibatnya pengangguran pun meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat kaum klasik, yang menyatakan bahwa penduduk yang semakin bertambah jumlahnya akan mengakibatkan penurunan pada pendapatan nasional, hal ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap kenaikan jumlah pengangguran.

Tingkat inflasi dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap besarnya jumlah pengangguran yang terjadi. Peningkatan pada inflasi akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini terjadi sebagai

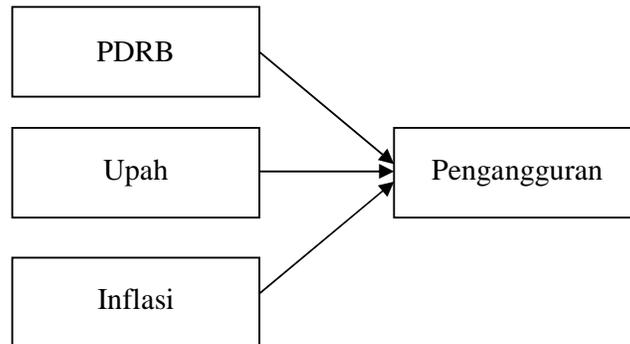
akibat dari peningkatan pada tingkat inflasi akan menurunkan tingkat investasi, akibatnya jumlah pengangguran meningkat seiring kesempatan kerja yang rendah. Di samping itu, inflasi juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan naik, harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran akan berkurang.

Besaran upah akan mempengaruhi jumlah pengangguran melalui permintaan dan penawaran tenaga kerja. Besaran upah dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dan tentunya upah yang tinggi. Jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima dan seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah besaran upah tersebut maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut. Pada pihak pengusaha, penetapan upah minimum yang tinggi akan menyebabkan

jumlah pengangguran yang bertambah. Hal ini dikarenakan perusahaan mengambil kebijakan efisiensi biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerja. Besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah pengangguran yang dilakukan adalah dengan besaran upah rata-rata *per* propinsi dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi melalui penambahan PDRB akan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan yang berorientasi pada padat karya, akan memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih besar terhadap pekerja, sehingga jumlah pengangguran pun dapat dikurangi. Pada sisi lain, hubungan pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya hanya akan mengutamakan pendapatan nasional yang besar tanpa memberikan kesempatan kerja yang lebih besar kepada pekerja, sehingga pertumbuhan ekonomi yang padat modal ini tidak berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti dengan jumlah pengangguran yang bertambah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber : Rum Alim, 2007 di modifikasi

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rum Alim (2007) adalah :

- a. Data Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data provinsi Jawa Tengah tahun 1991 – 2009 tentang PDRB, upah, inflasi dan pengangguran. Alasan pengambilan data tahun 1991 – 2009 karena pada tahun 1998 terjadi puncak krisis moneter yang terjadi di Indonesia sehingga penelitian ingin menganalisis data pada tahun sebelum dan sesudah krisis moneter. Sedangkan penelitian Rum Alim (2007) menggunakan data nasional tahun 1980 – 2007. Penelitian ini mengambil data selama 19 tahun terakhir terhitung dari tahun 1991 sampai dengan 2009, untuk data tahun 2010 tidak dijadikan objek penelitian karena belum tersedianya data yang dimiliki oleh BPS provinsi Jawa Tengah tentang Inflasi, PDRB berdasarkan harga konstan 2000 dan upah.
- b. Tahun penelitian ini adalah 2011 sedangkan tahun penelitian Rum Alim (2007) adalah 2007.

- c. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, upah, inflasi dan pengangguran terbuka, sedangkan penelitian Rum Alim (2007) menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, tingkat inflasi dan pengangguran terbuka.

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji setelah peneliti mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar (Arikunto, 2006). Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh antara PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
- H2 : Terdapat pengaruh antara Upah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
- H3 : Terdapat pengaruh ifikan antara Inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
- H4 : Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara PDRB, upah dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006), sedangkan Sugiyono (2007) mendefinisikan variabel sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi variabel penelitian adalah faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

a. Variabel dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel dependen adalah jumlah pengangguran, yaitu jumlah penduduk yang menganggur, yang termasuk angkatan kerja namun tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Variabel jumlah pengangguran yang digunakan adalah jumlah pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data dari BPS.

b. Variabel independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, upah dan inflasi.

1. PDRB

PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak, perhitungan PDRB akan ditimbulkan dari suatu daerah ada tiga pendekatan. PDRB yang dimaksud adalah data PDRB provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk perhitungan pada tahun 1991 – 2009 (dalam satuan Rupiah).

2. Upah

Besaran upah sangat mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia, karena para pencari kerja rela untuk menganggur untuk waktu tertentu dengan asumsi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Penentuan upah ini menggunakan rata-rata upah minimum regional (UMR) untuk kabupaten/kota se-Jawa Tengah (dalam satuan rupiah).

3. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi yang menunjukkan besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode waktu tertentu secara tahunan (tahun 1991-2009). Perhitungan ini menggunakan besarnya laju inflasi Jawa Tengah periode tahun 1991-2009 (dalam satuan persen).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu (Hasan, 2004). Data sekunder merupakan data-data penunjang dalam penelitian ini yang diperoleh dari lembaga/instansi yang terkait dalam penelitian ini, antara lain BPS Kota Semarang.

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai besarnya jumlah pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 1991-2009 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah.
- b. Data mengenai besarnya tingkat inflasi *year on year* di provinsi Jawa Tengah pada tahun periode tahun 1991-2009 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

- c. Data mengenai besarnya besaran upah minimum regional Provinsi Jawa Tengah periode tahun 1991-2009 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah.
- d. Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan 2000 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti (Hasan, 2004)

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 1991 – 2009. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta dari *browsing website* internet yang terkait dengan masalah pengangguran.

3.4. Metode Analisis

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis tersebut dengan menggunakan paket program SPSS. Analisis data

dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Linear Berganda, tetapi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, dependent variabel dan independent variabel keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001). Mendeteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *normal P-P Plot*. Adapun pengambilan keputusan didasarkan kepada :

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2001). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah dengan Menganalisa matrik korelasi variabel bebas jika terdapat korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi (lebih besar dari 0,90) hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin Watson*. Ketentuan autokorelasi dengan *Durbin Watson* dinyatakan sebagai berikut :

dl	du	DW	4-du	4-dl

Dinyatakan tidak ada autokorelasi jika DW berada antara du, dl dan 4-du, 4-dl ($dl < du < DW < 4-du < 4-dl$).

d. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya, adapun dasar untuk menganalisisnya adalah :

- a) Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Setelah melakukan uji asumsi klasik lalu menganalisis dengan metode regresi linear berganda dengan alasan variabel bebas terdiri dari beberapa variabel. Berdasarkan hubungan dua variabel yang dinyatakan dengan persamaan linear dapat digunakan untuk membuat prediksi (ramalan) tentang besarnya nilai Y (variabel dependen) berdasarkan nilai X tertentu (Variabel independent). Ramalan (prediksi) tersebut akan menjadi lebih baik bila kita tidak hanya memperhatikan satu variabel yang mempengaruhi (variabel independen) sehingga menggunakan analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2001). Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : variabel terikat : pengangguran terbuka.

α : koefisien konstanta.

β_1 : koefisien variabel PDRB

β_2 : koefisien variabel upah

β_3 : koefisien variabel inflasi

X1 : variabel PDRB

X2 : variabel upah

X3 : variabel inflasi

e : faktor pengganggu

2. Uji Statistik

a. Pengujian secara parsial (Uji t)

Pengukuran uji t dimaksudkan untuk mempengaruhi apakah secara individu ada pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian secara parsial untuk setiap koefisien regresi diuji untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan melihat tingkat signifikansi nilai t pada 5% rumus yang digunakan :

$$t_h = \frac{\beta_i}{S_e(\beta_i)}$$

Keterangan :

t_h : t hitung.

β_i : parameter yang diestimasi

S_e : *standar error*.

Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila nilai mutlak $t_h > t_t$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai $t_h < t_t$ maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

b. Pengujian secara simultan (Uji F)

Untuk menguji secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan melihat tingkat signifikansi (F) pada α 5% rumus yang digunakan :

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{K-1}}{\left(\frac{1-R^2}{N-K}\right)}$$

Keterangan :

R^2 : koefisien korelasi ganda.

F_h : F hitung.

K : jumlah variabel bebas.

N : jumlah sampel yang dipakai.

Pengujian setiap koefisien regresi bersama-sama dikatakan signifikan bila nilai $F_h > F_t$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai $F_h < F_t$ maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Kebaikan suatu model penelitian (*Goodness of Fit*) diukur dengan menggunakan koefisien determinan (R^2). Nilai R^2 semakin mendekati satu maka dapat dikatakan model penelitian semakin baik. Dalam *Classical Linear Model* yang terpenting adalah parameter dari populasi dan bukan *Goodness of Fit* dari sampel. Walaupun R^2 adalah ukuran keseluruhan model fit dengan data yang terpenting adalah teori yang mendukung model, tanda dari koefisien yang diestimasi dan signifikansi statistiknya. Jika suatu model baik dalam kriteria tadi maka model dengan R^2 yang rendah dapat diterima. Jadi R^2 tinggi bukan berarti baik dan sebaliknya R^2 yang rendah bukan berarti jelek.